

INTERVENSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI MODEL PENGELOLAAN PESISIR KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU

Sitti Faoziyah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: fauziah_zia2000@yahoo.com

Abstrak

Kehidupan masyarakat pesisir seringkali dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi, salah satu penyebabnya karena peristiwa alam yang berdampak adanya kerusakan wilayah pesisir itu sendiri. Penelitian ini menganalisis intervensi pengembangan masyarakat di pesisir Karangsong, model pengelolaan pesisir dalam pelestarian dan pemanfaatan mangrove, potensi jaringan sumber dalam komunitas pengelola hutan mangrove. Metode penelitian yang digunakan adalah *mix method*. Data dikumpulkan melalui survey, wawancara dan observasi. Analisis data kuantitatif secara uji korelasi dan kualitatif secara interpretif melalui pengelompokan data, coding, reduksi, penampilan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pengembangan masyarakat di pesisir Karangsong dilakukan dengan dua pendekatan model pengembangan masyarakat lokal dan model perencanaan sosial. Model pengelolaan pesisir didasarkan prinsip keseimbangan yang ditoleransi lingkungan dan masyarakat secara terpadu. Mitigasi bencana di pesisir Karangsong dilakukan dengan cara; (1) struktural; upaya teknis alami pengelolaan hutan mangrove dan upaya teknis buatan alat pemecah ombak; (2) non struktural; partisipasi pengelola hutan mangrove dan menetapkan regulasi berupa peraturan desa. Pelestarian hutan mangrove sebagai mitigasi bencana bergerak ke arah pemberdayaan sosial-ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan mangrove yang memiliki *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat. Korelasi perusahaan dengan kelompok pengolah hasil mangrove (sig. 0.003) menunjukkan korelasi yang signifikan. Korelasi pemerintah dengan perusahaan mengelola mangrove menunjukkan signifikan (sig. 0.000). Korelasi yang signifikan karena didorong oleh kepentingan yang sama yaitu melaksanakan regulasi pemerintah. Potensi jaringan sumber kekuatan komunitas pengelola hutan mangrove membentuk hubungan kolaborasi berbagai pihak (multipihak) baik individu, kelompok maupun kelembagaan formal dan non formal.

Kata Kunci : intervensi komunitas, model pengelolaan pesisir

A. Pengenalan

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di wilayah pesisir Karangsong Kabupaten Indramayu. Sosial-budaya dan geografis wilayah pesisir menyertai karakteristik permasalahan kesejahteraan di mana masyarakat itu tinggal. Sehingga menuntut model intervensi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Karangsong memiliki potensi sektor maritim dan kekayaan minyak dan gas bumi. Sumberdaya wilayah pesisir dan lautan menjadi modal utama untuk keberlangsungan hidup masyarakat Karangsong. Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh sumberdaya pesisir dan kelautan. Bukan saja masyarakat yang memiliki kepentingan keberlangsungan hidup, pemerintah lokal juga berkepentingan mengatur dan melakukan tatakelola potensi wilayahnya sebagai sumber pembangunan ekonomi di daerah. Pihak lainnya seperti perusahaan juga memiliki kepentingan terhadap kawasan pantai Karangsong karena letaknya yang sangat berdekatan dengan aktivitas pengolahan minyak dan gas bumi (migas) PT Pertamina (Persero), terutama wilayah ini sangat berdekatan dengan pembuangan limbah industri. Dari sini dapat dipahami bahwa terdapat beberapa pihak yang berkepentingan terhadap pelestarian wilayah Karangsong.

Potensi pesisir yang menjadi tumpuan hidup, dimanfaatkan warga untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi seperti pembudidaya ikan, pedagang ikan, nelayan, transportasi laut dan lain-lain. Namun wilayah pesisir juga sangat rentan terhadap tekanan lingkungan dan bencana alam. Kondisi alam seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat lokal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sehingga memperburuk kualitas hidup masyarakat. Salah satu gangguan yang sering mengancam adalah banjir air laut atau naiknya permukaan air laut yang sering disebut Rob. Rob adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang yang menggenangi daratan. Ancaman lain bagi masyarakat adalah abrasi pantai yaitu proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut. Terganggunya keseimbangan alam dapat dipengaruhi karena perubahan iklim yang berdampak terhadap kehidupan biota laut beserta perairannya. Hal ini membutuhkan langkah-langkah mitigasi bencana di wilayah pesisir guna menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan alam sekitarnya.

Intervensi pengembangan masyarakat di wilayah pesisir difokuskan pada upaya mitigasi rob dan abrasi pantai dengan cara menanam, memelihara dan melestarikan hutan

mangrove. Partisipasi masyarakat melestarikan hutan mangrove juga memberi dampak pada aspek sosial-ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci penting dalam proses pemberdayaan. Pengembangan jaringan sumber internal dan eksternal masyarakat dirancang untuk memetakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kelompok pelestarian hutan mangrove di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggali tentang intervensi pengembangan masyarakat di pesisir Karangsong, model pengelolaan pesisir dalam pelestarian dan pemanfaatan mangrove dan potensi jaringan sosial masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode mix method. Subjek penelitian masyarakat pemelihara dan pengolah mangrove, pemerintah desa dan perusahaan. Penelitian ini memperoleh bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, swasta tentang potensi dan masalah masyarakat pesisir. Sedangkan data kuantitatif diambil berdasarkan survey masyarakat di wilayah Karangsong tentang. Data hasil survey, observasi dan wawancara dianalisis menggunakan teknis secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif hasil survey dianalisis menggunakan SPSS untuk uji korelasi. Sedangkan data kualitatif menggunakan teknik triangulasi sehingga data menjadi valid. Selanjutnya dilakukan verifikasi, reduksi kemudian dideskripsikan berdasarkan tema-tema yang ditemukan dari lapangan.

B. Kerangka Teori

1. Model Intervensi Komunitas

Intervensi dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang menghasilkan perubahan dan menyediakan sumber-sumber, sekecil suatu teknik tertentu atau sebesar penyediaan sosial (*social provision*), seperti membuat interpretasi, atau membuat rujukan ke lembaga lain, atau pengembangan suatu program pelayanan sosial (Fahrudin, 2012:72). Hakikatnya bahwa intervensi merupakan aktivitas yang bertujuan pemberian dampak perubahan kondisi bagi kelompok yang membutuhkan pelayanan. Sedangkan istilah intervensi komunitas merupakan salah satu metode intervensi yang dilakukan pada level komunitas. Sebagai sebuah metode, intervensi komunitas dapat dipahami sebagai aktivitas untuk mencapai tujuan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, terminologi yang banyak digunakan pada dasawarsa 1970-1990-an adalah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (*community organization and community development*). Istilah intervensi komunitas (*community intervention*) adalah istilah yang relatif baru dikembangkan sekitar tahun 2000-an. (Adi, 2013). Di Indonesia istilah *community organization and community development* lebih dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, intervensi komunitas dilakukan dengan berbagai macam model. Rothman (1995) membagi pendekatan intervensi komunitas menjadi tiga; (1) pengembangan masyarakat lokal, (2) perencanaan dan kebijakan sosial dan (3) aksi sosial. Salah satu ciri dari pendekatan pengembangan masyarakat lokal pengambilan keputusan dengan cara konsensus. Sedangkan pendekatan perencanaan dan kebijakan sosial dilakukan sebagai bentuk adanya kepatuhan, serta pendekatan aksi sosial berupa tekanan yang ditujukan kepada kelompok elit. Rothman (1995) membedakan praktek ketiga model intervensi tersebut dengan menggunakan sebelas indikator. Namun sesuai dengan keperluan penelitian ini, pembahasan dibatasi pada indikator kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat, strategi dasar dalam melakukan perubahan, karakteristik dan teknik perubahan, peran praktisi dan peran penerima layanan (*beneficiaries*).

Kedua model pertama banyak digunakan dalam praktek intervensi komunitas, khususnya dalam implementasi pengelolaan pesisir Karangsong, setidaknya terdapat indikator berikut ;

- a. Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat; pada model pengembangan masyarakat lokal tujuan tindakan lebih berorientasi pada pengembangan kapasitas masyarakat untuk memecahkan masalahnya secara mandiri melalui prinsip-prinsip demokratis. Sehingga dalam proses intrvensinya dapat dilakukan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kemauan serta kemampuan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar pesisir Karangsong dengan mengedepankan prinsip kooperatif dan kerjasama di antara mereka. Sedangkan pada model perencanaan sosial orientasi tujuan tindakan terhadap masyarakat lebih berbobot pada aspek penyelesaian tugas memecahkan masalah-masalah yang kongkrit. Kedua model ini terlihat

sangat kontras, jika model pengembangan masyarakat lokal bertumpu pada kelompok masyarakat (klien) sebagai tujuan tindakan, namun model perencanaan sosial proses intervensinya karena didorong adanya tugas-tugas yang mewajibkan keterlibatan agen perubahan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

- b. Strategi dasar dalam melakukan perubahan; dalam pengembangan masyarakat lokal praktisi menekankan aspek pelibatan warga masyarakat untuk menentukan kebutuhan yang mereka perlukan dan upaya memecahkan masalah mereka. Karakteristik masalah sosial dan lingkungan di pesisir Karangsong berusaha diselesaikan dengan cara melibatkan warga sebanyak mungkin. Hal ini menjadi ciri dari proses pengembangan masyarakat lokal. Sementara perencana sosial berupaya mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta (data) dari masyarakat untuk mengembangkan program kegiatan. Salah satu masalah di pesisir adalah terjadinya abrasi sebagai faktor penghambat aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, maka proses intervensi dilakukan dengan mengumpulkan informasi, data dan fakta-fakta sebagai dasar perencanaan sosial dan kebijakan mitigasi bencana di pesisir Karangsong.
- c. Karakteristik teknik perubahan; proses intervensi pada model pengembangan masyarakat lokal difokuskan pada tujuan adanya konsensus, sehingga kegiatan-kegiatan berdiskusi antar warga secara individu maupun kelompok sangat mewarnai model ini. Sementara model perencanaan sosial lebih menekankan pada teknik analisis data-data, sehingga menghasilkan pendekatan perubahan yang tepat bagi masyarakat. Maknanya bahwa teknik perubahan yang dilakukan pekerja sosial menekankan pendekatan intervensi yang lebih terencana (preventif).
- d. Peran praktisi; ciri utama model pengembangan masyarakat lokal adalah peran pekerja sosial komunitas membangkitkan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien disamping upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan klien. Berbeda dengan model perencanaan sosial, lebih menitikberatkan pekerja sosial sebagai produsen atau penghasil produk sosial, sehingga klien dipandang sebagai konsumen.
- e. Peran penerima layanan (*beneficiaries*); sebagaimana tujuan perubahan adalah untuk membentuk konsensus, maka pada model pengembangan masyarakat lokal

penerima layanan memainkan peran sebagai subjek yang terlibat secara partisipatif untuk berinteraksi secara aktif dengan warga lainnya termasuk interaksi dengan pekerja sosial masyarakat. Sedangkan model perencanaan sosial menempatkan klien sebagai penerima program atau pengguna pelayanan. Dalam hal ini model perencanaan sosial lebih bersifat *top-down*.

2. Model Pengelolaan Pesisir dalam Pengembangan Masyarakat

Pengelolaan pesisir memiliki beragam model dan tidak ada yang bersifat baku. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pesisir bersifat dinamis, dikarenakan kondisi masyarakat lokal yang berada di sekitar pesisir, berbagai kepentingan kelompok dan dinamika masalah yang melingkupinya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan adanya sinergi dan interaksi yang tepat antara pemerintah, masyarakat dan nilai kearifan lokal. Proses pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan wilayah pesisir ditujukan untuk mendorong kemandirian dengan menitikberatkan pada peran serta aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, dan memberi keleluasaan bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautan sesuai dengan potensi, karakteristik dan sosial budaya masyarakatnya. (Dewi, 2018: 163). Hasil penelitian lainnya, model pengelolaan pesisir dilakukan dengan cara sinergi diantara berbagai sektor dengan mengembangkan model pengelolaan pesisir dan laut yang bersifat terpadu dalam bentuk rencana strategis, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi. (Swasta: 2012).

Hasil penelitian di atas sejalan dengan regulasi pemerintah tentang pengelolaan pesisir yaitu UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Merujuk pada regulasi tersebut bahwa yang dimaksud pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi pengelolaan pesisir bisa saja dilakukan

dengan berbagai macam model dan pendekatan, namun dengan tujuan yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu terdapat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengaturan ini memberi arah bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Karenanya beberapa hasil penelitian seolah membuktikan bahwa pengelolaan pesisir berbasis masyarakat membuahkan hasil yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Intervensi komunitas dalam pengelolaan pesisir Karangsong memusatkan pada model keseimbangan pengelolaan yang berdampak terhadap adanya keseimbangan manusia dan lingkungan alamnya. Praktik pekerjaan sosial sangat menekankan aspek keseimbangan antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya, karena manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki kesatuan dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam yang saling mempengaruhi satu sama lain. Atas dasar inilah intervensi komunitas menegaskan keseimbangan aspek kebutuhan manusia dan keberlangsungan lingkungan hidup selama proses intervensi berlangsung. Secara konseptual model pengelolaan pesisir terpadu merupakan usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan terciptanya keseimbangan yang dapat ditoleransi oleh masyarakat dan lingkungan (daya dukung lingkungan dan sosial). (Diposaptono, 2003 : 6). Model pengelolaan pesisir terpadu merepresentasikan pembangunan di kawasan pesisir berorientasi pada pola pembangunan yang terencana dengan menggunakan pendekatan pengelolaan (*management based approach*). Untuk mencapai keseimbangan tujuan tersebut diperlukan tiga komponen yang berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi, yaitu; (1) keseimbangan ekologis, (2) keseimbangan pemanfaatan dan (3) keseimbangan dalam pencegahan bencana (mitigasi). Tujuan akhir dari pelaksanaan pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk memadukan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dikelola oleh berbagai pihak; masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan lain-lain.

Konsep pengelolaan pesisir secara terpadu dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis model-model pengelolaan pesisir Karangsong melalui proses intervensi komunitas yang bertumpu pada penyertaan masyarakat lokal. Pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan tentang pengelolaan pesisir yang berdampak pada terciptanya keseimbangan kebutuhan sosial dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak

dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai suatu program kegiatan untuk mencapai suatu tujuan memenuhi kesejahteraan kelompok sasaran. Sebagai sebuah program kegiatan, Payne (1997) menjelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat ; *to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients*”

Karakteristik masalah yang terjadi di pesisir perlu diketahui sebagai latar dilakukannya intervensi. Masyarakat pesisir sering dihantui oleh ancaman bencana, padahal pesisir merupakan andalan utama mereka dalam kegiatan sosial ekonomi. Bencana dan kerusakan lingkungan bisa disebabkan karena faktor alam ataupun faktor manusia itu sendiri. Sehingga dalam penanganannya tidak selalu bertumpu pada aspek teknis saja, namun membutuhkan kesadaran manusia dalam memperlakukan lingkungan alam sekitarnya. Praktek pengembangan masyarakat lokal menekankan penyelesaian masalah dengan cara melibatkan warga masyarakat sebanyak mungkin menemukan penyebab masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Karenanya menurut Haryani (2012) peran serta dan pelibatan masyarakat sangat penting dalam membuat model mitigasi bencana di wilayah pesisir karena masyarakat pesisir lebih mengenal permasalahan kebencanaan yang sering menimpa mereka serta agar masyarakat di wilayah pesisir dapat secara proaktif meminimalisir (mitigasi secara mandiri) dampak bencana yang akan terjadi ditempat mereka tinggal/bermukim. Hal ini berkaitan juga dengan sikap masyarakat, seperti hasil penelitian Wahidin (2017) bahwa pada dasarnya masyarakat di wilayah Karangsong telah memiliki kemampuan menemukan permasalahan, karena adanya sikap ilmiah masyarakat yang terbentuk oleh nilai-nilai dasar, budaya masyarakat lokal, kearifan lokal, prinsip hidup dan strategi bertahan hidup. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ilmiah adalah pola komunikasi, kebiasaan, rasa/hati, pola pikir, motivasi dan pemahaman terhadap substansi masalah. Sikap ilmiah masyarakat inilah yang menggerakkan *mindset* dan tindakan masyarakat untuk berupaya mengenali masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, peran pekerja sosial dalam praktik intervensi komunitas perlu mengelaborasi dan membangkitkan sikap ilmiah masyarakat melalui komunikasi dan motivasi untuk menumbuhkan aksi kolektif dan kerjasama masyarakat dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahannya.

Mitigasi dapat dilakukan dengan cara; (1) struktural dan (2) non struktural. Secara struktural yaitu dengan melakukan upaya teknis, baik secara alami maupun buatan. Sedangkan mitigasi secara non struktural adalah upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. (Diposaptono, 2003:5). Dalam hal ini mitigasi bencana merupakan salah satu wilayah kajian dalam pekerjaan sosial. Pendekatan pencegahan bencana diakui menjadi strategi efektif dalam pengembangan masyarakat. Meski demikian rehabilitasi pasca bencana juga tetap menjadi domain dalam pengembangan masyarakat. Kondisi masyarakat yang rawan bencana, diperlukan upaya mitigasi bencana dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menciptakan perilaku manusia yang ramah lingkungan. Dalam prosesnya, pemberdayaan masyarakat menuntut adanya produk sosial yang efektif bagi perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat merupakan bagian dari produk sosial. Namun produk sosial tidak terbatas pada bentuk konsep-konsep, ide/gagasan dan praktek intervensi saja. Seiring kemajuan informasi dan teknologi saat ini pekerja sosial dituntut mempunyai produk sosial yang *tangible* yang dapat dilihat dan dirabaraskan dan bermanfaat bagi masyarakat secara nyata. Sebagaimana Kotler (1981) menjelaskan tiga jenis produk sosial dalam konsep pemasaran sosial, yaitu; (1) ide atau gagasan, (2) praktek dan (3) bentuk yang nyata. Produk sosial yang *tangible* biasanya berbentuk fisik yang dibutuhkan sebagai sarana perubahan perilaku dan berdayaguna memecahkan masalah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kebutuhan terhadap produk sosial yang *tangible* banyak diharapkan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran perubahan. Terutama jika tujuan perubahan itu sendiri bukan sekedar terjadinya perubahan pemahaman atau pengetahuan masyarakat. Namun perubahan pemahaman yang disertai dengan perubahan perilaku yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, sehingga keberhasilan intervensi lebih terukur. Misalnya proram mitigasi bencana alam di kawasan pesisir, di samping upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan abrasi, namun dibutuhkan praktek langsung mitigasi bencana berupa alat pemecah ombak untuk menahan abrasi yang dapat membahayakan masyarakat. Teknologi sederhana berupa alat pemecah ombak dengan berbahan dasar ban bekas. Dari sini terlihat bahwa pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mitigasi bencana abrasi pantai (konsep/gagasan) dilakukan dengan sosialisasi membangun kesadaran dan mengedukasi perilaku masyarakat (praktek), tetapi penyediaan

alat atau benda yang dapat dipergunakan oleh masyarakat berupa ban bekas untuk pemecah ombak (bentuk nyata). Konsep pemasaran sosial dengan menekankan produk sosial yang *tangible* ditemukan ketika pekerja sosial menerapkan model perencanaan sosial dengan menempatkan klien sebagai konsumen.

3. Model Kekuatan dan Teknik Analisis Jaringan Sumber

Model kekuatan dan analisis jaringan sumber dipaparkan untuk mengetahui praktik intervensi komunitas yang difokuskan pada kekuatan masyarakat sebagai klien. Pengembangan masyarakat lokal menitikberatkan pada konsensus dan pengembangan kapasitas masyarakat. Mengembangkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Pekerja sosial menempatkan klien (masyarakat) sebagai kelompok sasaran yang memiliki kekuatan yang dapat dijadikan sumber dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga dibutuhkan kemampuan menggali informasi mengenai kekuatan sumber baik yang ada di dalam komunitas ataupun yang bersumber dari luar komunitas.

Analisis jaringan sumber diperlukan untuk memberi gambaran jaringan sumber-sumber yang saling terkait dan bahkan dapat menampilkan bentuk kolaborasi (kerjasama) antar lembaga. Hal ini dapat membantu pekerja sosial untuk merancang intervensi pada klien. Tan dan Envall (2000) dalam Suharto (2009); menjelaskan “seorang pekerja sosial profesional yang terlatih mampu menganalisis situasi-situasi kompleks dan memfasilitasi perubahan-perubahan secara individual, organisasional, sosial dan kultural. Pekerja sosial adalah para pengelola/pemberi sumber-sumber kemasyarakatan yang terlatih terhadap mereka yang sangat membutuhkan. Praktek intervensi dengan menggunakan model kekuatan menekankan pada prinsip penggalan kekuatan-kekuatan klien sejak tahapan asesmen, tahap intervensi sampai evaluasi. Mengoptimalkan dan berupaya memobilisasi sumber terlebih dahulu dan mengubah lingkungan klien sesuai dengan kebutuhan klien. Model kekuatan memperhatikan sumber, potensi kemanusiaan dan lingkungan klien (Zastrow :1999).

Konsep pendekatan kekuatan (*Strengths Model*) erat kaitannya dengan teknik analisis jaringan sumber. Suharto (2009) mendefinisikan analisis jaringan sumber (*resource network analysis*) adalah pemetaan dan pengukuran hubungan dan interaksi beragam sumber dalam sebuah kesatuan sosial atau entitas sosial (lingkungan keluarga, lembaga atau masyarakat)

yang melibatkan orang, kelompok masyarakat dan lembaga masyarakat, informasi dan beragam pelayanan sosial di dalamnya. Kompleksitas permasalahan masyarakat banyak disebabkan karena berbagai kepentingan baik individu, kelompok masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada. Analisis jaringan sumber juga bisa digunakan untuk mengungkap hubungan kepentingan masing-masing pihak termasuk kerjasama masing-masing pihak untuk tujuan pengembangan masyarakat. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pesisir Karangsong adalah kelompok masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta.

Pemetaan jaringan sumber digunakan untuk mengetahui sumber internal dan eksternal serta interaksi kedua sumber tersebut. Jaringan sumber penting dipetakan guna merancang intervensi yang tepat bagi klien. Suharto membagi menjadi 3 tema analisis jaringan sosial yakni; (1) jenis, manfaat dan kualitas sumber yang ada dan terlibat dalam kehidupan klien sehingga dapat meningkatkan standar hidupnya, (2) aksesibilitas klien terhadap sumber-sumber, (3) interaksi antar sumber.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Intervensi Pengembangan Masyarakat di Pesisir Karangsong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha kesejahteraan sosial berupa pengelolaan pesisir Kabupaten Indramayu salah satunya dilakukan dengan cara mengelola kawasan hutan mangrove di Desa Karangsong. Pelestarian hutan mangrove melibatkan berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) sehingga dilakukan secara terencana untuk berbagai kepentingan seluruh stakeholder yang terlibat. Kawasan hutan mangrove di pesisir Karangsong dilakukan untuk kebermanfaatan daya dukung sosial dan lingkungan. Proses intervensi komunitas mengarah pada dua pendekatan yaitu model pengembangan masyarakat lokal dan model perencanaan sosial (Rothman : 1995).

Model perencanaan sosial sangat mewarnai ketika kawasan hutan mangrove di Karangsong ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Sehingga orientasi tujuan intervensi lebih ditekankan pada *task goal* (penyelesaian tugas) yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan karakteristik wilayah pesisir seperti; abrasi dan rob. Program kawasan hutan mangrove dalam proses intervensinya di dominasi oleh lembaga pemerintah dan

swasta, dikarenakan adanya regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir. Meskipun kelompok masyarakat turut terlibat tetapi perannya tidak dominan. Hal ini menegaskan pendekatan pembangunan yang *top-down*, meskipun pendekatan *top-down* tidak selalu berkonotasi negative dikarenakan tujuan pengelolaan pesisir Karangsong membutuhkan keterlibatan pemerintah secara penuh baik fasilitas infrastruktur maupun pembiayaan. Model perencanaan sosial juga terlihat dalam strategi perubahannya, dimana pemerintah daerah dan PT Pertamina melakukan berbagai kajian di wilayah pesisir Karangsong guna mengumpulkan data dan fakta yang dijadikan basis intervensi yang terencana. Kajian wilayah di pesisir Karangsong melibatkan tenaga ahli yang dibiayai oleh pemerintah dan perusahaan. Pemerintah daerah menggarakan dana penelitian dan pengembangan di bawah kordinasi Bappeda Kabupaten Indramayu, sedangkan PT Pertamina menganggarkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) salah satunya diperuntukkan membuat kajian *social mapping*.

Mitigasi bencana di pesisir Karangsong dilakukan dengan cara; (1) struktural; berkaitan dengan teknis menanam, memelihara dan melestarikan hutan mangrove dan pembuatan alat pemecah ombak lainnya. Dinas kehutanan dan Dinas lingkungan hidup menyediakan kebutuhan bibit mangrove untuk ditanam oleh masyarakat di area hutan mangrove Karangsong; (2) non struktural; yaitu dengan membuat kelompok pegiat mangrove (kelompok penanam dan kelompok pemanfaat mangrove) dan menetapkan regulasi berupa peraturan desa yang mengatur sanksi bagi warga yang menebang pohon mangrove. Sedangkan pemerintah kabupaten mengawasi fungsi lahan hijau / ruang terbuka hijau.

Sedangkan model pengembangan masyarakat lokal terlihat pada intervensi pemeliharaan dan pemanfaatan hutan mangrove sebagai sumber ekonomi masyarakat, baik mengolah berbagai produk olahan mangrove maupun hutan mangrove sebagai tempat pariwisata lokal. Dalam hal ini program kawasan hutan mangrove yang semula bertujuan sebagai mitigasi bencana abrasi telah bergeser pada pemanfaatan mangrove sebagai sumber ekonomi masyarakat. Sehingga dalam proses intervensinya sangat kental dengan model pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) (Rothman : 1995). Pembentukan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove dilakukan sebagai langkah strategi perubahan. Pelibatan warga masyarakat menentukan kebutuhan dilakukan dengan konsensus merupakan ciri yang paling mendasar dalam model pengembangan masyarakat lokal. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat Karangsong cenderung homogen dan berkaitan dengan karakteristik pesisir dan laut hingga membentuk

kelompok-kelompok fungsional berdasar mata pencaharian mereka seperti kelompok petambak, kelompok nelayan, kelompok pengrajin perahu, kelompok pengolah mangrove dan sebagainya. Proses pengembangan masyarakat lokal sangat diwarnai unsur pemberdayaan, pekerja sosial berupaya melibatkan warga baik individu maupun kelompok untuk menentukan kebutuhannya. Program pemeliharaan hutan mangrove dilakukan sebagai mitigasi bencana rob dan abrasi dilakukan oleh kelompok penanam dan pemelihara mangrove. Sedangkan kelompok pengolah hasil hutan mangrove lebih berkonsentrasi pada upaya pengembangan ekonomi lokal, dengan cara mengolah mangrove menjadi berbagai produk olahan yang bernilai ekonomi. Pada tahap ini pendekatan pembangunan lebih bersifat *bottom-up*. Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan di dalam setiap pertemuan-pertemuan kelompok petambak dan nelayan hingga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menanam dan memelihara kawasan hutan mangrove. Pemimpinan yang berasal dari komunitas juga diperankan dalam kelompok pengelola hutan mangrove. Peran kepemimpinan lokal berkontribusi besar dalam pembentukan kelompok dan upaya penyadaran masyarakat.

Implementasi pengelolaan hutan mangrove tidak saja melibatkan masyarakat secara utuh, namun melibatkan pemerintah desa dan perusahaan (PT Pertamina). Pemerintah desa merupakan lembaga yang berfungsi membuat regulasi di wilayah pemerintahannya, melindungi masyarakatnya termasuk dalam penyelenggaraan program mitigasi bencana. Sedangkan perusahaan memiliki tata kelola dampak lingkungan industri sesuai ketentuan regulasi. Di samping itu adanya tuntutan etika bisnis yang mengharuskan warga perusahaan menjaga prinsip kewargaan yang baik (*good citizenship*) dengan masyarakat lokal.

2. Pengelolaan Pesisir Terpadu dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Mangrove

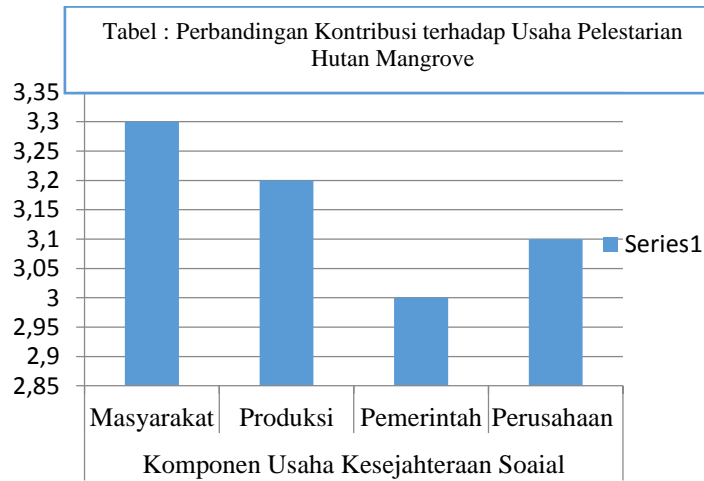
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pesisir Karangsong dilakukan secara terpadu. Hutan mangrove kini bukan saja sebagai upaya mitigasi bencana, tetapi berdampak pada pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Pengelolaan pesisir terpadu dilakukan dengan mengoptimalkan hutan mangrove pesisir Karangsong menjadi sumber yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai aspek kehidupan; ekologi, edukasi, ekonomi, sosial-budaya dan pariwisata. Sejalan dengan prinsip pengelolaan pesisir terpadu memenuhi unsur ; (1) keseimbangan ekologis, (2) keseimbangan pemanfaatan, dan (3) keseimbangan dalam pencegahan bencana (mitigasi). Model peneglolaan pesisir melalui

hutan mangrove di Karangsong menciptakan *multiplier effect* bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Hutan mangrove yang lestari dapat menjaga keanekaragaman hayati flora dan fauna adalah bentuk pemenuhan unsur keseimbangan ekologis. Sedangkan unsur keseimbangan pemanfaatan kawasan hutan mangrove diwujudkan melalui kegiatan pariwisata lokal dan produk olahan mangrove. Di samping itu hutan mangrove bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan sebagai sarana edukasi dan mendukung kebijakan pendidikan tentang kurikulum lokal berbasis mangrove. Hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari gelombang laut, tempat singgah air, penahan abrasi dan sebagainya merupakan bagian dari model kesimbangan mitigasi.

Proses pemberdayaan pengelolaan mangrove melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari penanaman hingga pemeliharaan pohon mangrove melibatkan kelompok petambak, nelayan dan karang taruna. Sedangkan pelibatan kelompok perempuan pada sektor pemanfaatan mangrove untuk berbagai produk olahan. Kelompok perempuan tergabung dalam kelompok Ibu PKK. Kelompok pemelihara mangrove dan pengolah produk mangrove memiliki hubungan yang erat karena banyak diantara mereka memiliki ikatan keluarga.

Kawasan hutan mangrove telah mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Daya tarik wisatawan untuk rekreasi maupun edukasi dan kegiatan pengolah produk mangrove membangkitkan pergerakan ekonomi dalam skala lokal. Merujuk pada konsep pemasaran sosial (Kotler:1981) dapat dilihat 3 tipe produk sosial dalam pemberdayaan masyarakat berbasis mangrove, yaitu : (1) gagasan masyarakat berupa program pelestarian hutan mangrove sebagai upaya mitigasi bencana yang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat termasuk dalam tipe *social idea*, (2) proses yang terjadi dalam kelompok penanaman, pemelihara dan pengolah hasil mangrove disebut sebagai *social practice*, (3) perubahan sosial yang menciptakan *multiplier effect* pemanfaatan mangrove menjadi industri; pariwisata, berbagai macam olahan makanan, minuman, pewarna batik alami, pakan ikan, kurikulum lokal di sekolah dan sebagainya merupakan tipe produk sosial yang kasat mata bisa dirabarasakan adalah tipe *social tangible*. Program pemanfaatan hutan mangrove melibatkan fungsi struktural pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan perusahaan. Program pemeliharaan hutan mangrove mendapat dukungan berbagai pihak dan dibangun oleh kemitraan antar pihak; komunitas masyarakat pemelihara hutan mangrove, komunitas yang memanfaatkan mangrove, pemerintah dan perusahaan. Masing-masing komponen memiliki

kontribusi terhadap usaha kesejahteraan sosial masyarakat lokal dengan memanfaatkan hutan mangrove. Adapun perbandingan kontribusi dijelaskan pada table berikut:



Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi paling tinggi dalam pelestarian hutan mangrove adalah masyarakat pemelihara dan pengolah mangrove. Sementara kontribusi pihak pemerintah dianggap paling rendah. Tingginya kontribusi masyarakat dikarenakan adanya partisipasi yang tinggi, masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pembentukan ide/gagasan program dan pemeliharaan mangrove secara langsung. Hal lain yang mendasari kontribusi masyarakat yang tinggi dikarenakan adanya hubungan kekerabatan dalam kelompok. Komponen pemerintah memiliki dukungan berupa kebijakan, penyediaan bibit pohon mangrove serta perluasan informasi kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan perusahaan berkontribusi penyediaan alat-alat dan teknologi sistem produksi olahan mangrove. Kontribusi pemerintah dan perusahaan dalam proses pelaksanaan pelestarian mangrove tidak terlibat secara langsung.

3. Potensi Jaringan Sumber dalam Pelestarian Hutan Mangrove

Hasil penelitian diperoleh data bahwa model kekuatan yang membentuk jaringan sumber dalam mendukung usaha kelompok pengelola hutan mangrove memiliki hubungan dan interaksi yang didasarkan karena adanya kedekatan geografis (fisik) dan kesamaan kepentingan. Kelembagaan masyarakat baik pemerintahan, swasta dan kelompok masyarakat memiliki kebutuhan akan keberlangsungan hidup untuk diri,

keluarga, kelompok maupun kelembagaan. Potensi pesisir Karangsong merupakan sumber kesejahteraan seluruh entitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Banyak pihak yang berkepentingan melestarikan pesisir. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kelompok pengelola hutan mangrove; kelompok masyarakat, pemerintah, LSM dan organisasi bisnis. Letak Desa Karangsong berada sangat dekat dengan industri migas PT Pertamina. Salah satu limbah industri migas adalah limbah cair yang dibuang ke laut, apabila tidak dikelola dengan baik bisa mengakibatkan terancamnya kehidupan biota pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sisi lain perusahaan harus memiliki kepedulian memberdayakan warga sekitar melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Kedekatan geografis dengan warga sekitar dan regulasi yang mengatur tentang tatakelola organisasi bisnis menjadi landasan utama bagi perusahaan untuk turut serta melestarikan hutan mangrove. Sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu juga berkepentingan terhadap perusahaan dan keberadaan pesisir Karangsong, karena keduanya merupakan aset daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah memainkan peran pengawasan terhadap limbah industri dan memberi jaminan perlindungan kesejahteraan bagi warganya. Kesamaan kepentingan masing-masing pihak membentuk suatu jaringan kekuatan masyarakat Karangsong untuk bekerjasama dan berkolaborasi melestarikan hutan mangrove yang berdampak pada penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kelompok pemelihara mangrove sebagian besar adalah kelompok petambak, karenanya menjaga hutan mangrove bagi mereka merupakan proses pekerjaan sehari-hari karena mangrove dapat menjaga keberlangsungan usaha tambak itu sendiri.

Tabel hasil survey di bawah ini menjelaskan tentang korelasi antar komponen masyarakat pemelihara mangrove, masyarakat industri pengolah hasil mangrove, pemerintah dan perusahaan sebagai berikut;

Tabel 1 : Korelasi Antar Komponen dalam Pemanfaatan Mangrove

		Kelompok pemelihara	Kelompok pengolah	Pemerintah	Perusahaan
Kelompok pemelihara	Pearson Correlation	1	.114	.143	.442*
	Sig. (2-tailed)		.548	.451	.015
	N	30	30	30	30
Kelompok Pengolah hasil mangrove	Pearson Correlation	.114	1	.457*	.518**
	Sig. (2-tailed)	.548		.011	.003
	N	30	30	30	30
Pemerintah	Pearson Correlation	.143	.457*	1	.859**
	Sig. (2-tailed)	.451	.011		.000
	N	30	30	30	30
Perusahaan	Pearson Correlation	.442*	.518**	.859**	1
	Sig. (2-tailed)	.015	.003	.000	
	N	30	30	30	30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

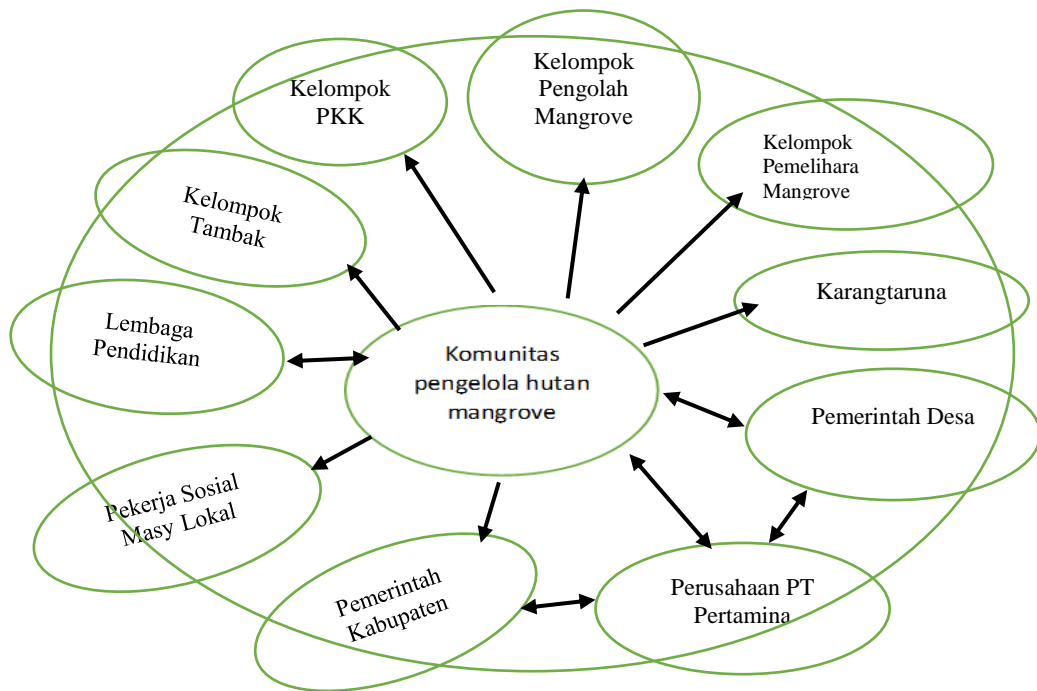
Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum keempat komponen menunjukkan adanya korelasi, tetapi bobot korelasi ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Korelasi masyarakat pemelihara mangrove dan masyarakat industri pengolah hasil mangrove tidak signifikan. Hal ini dimungkinkan karena pihak masyarakat mendukung mangrove untuk dijadikan komoditas ekonomi, tetapi pihak masyarakat tidak mampu membiayai. Lain halnya korelasi perusahaan dengan kelompok pengolah hasil mangrove (sig. 0.003) menunjukkan korelasi yang signifikan. Artinya bahwa dukungan perusahaan dirasakan manfaatnya oleh kelompok pengolah mangrove untuk menjadi nilai ekonomi. Sedangkan korelasi antara pihak pemerintah dengan perusahaan untuk bersinergi mengembangkan mangrove menjadi industri olahan menunjukkan signifikan (sig. 0.000). Korelasi yang signifikan karena di dorong oleh kepentingan yang sama yaitu melaksanakan regulasi pemerintah.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji signifikansi antar komponen yang saling mempengaruhi dalam komunitas pengelola hutan mangrove.

Tabel :	
Hasil Uji korelasi Antara Komponen Pengelola Hutan Mangrove	
Test Value = 0	

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Komunitasn pemelihara mangrove	143.925	29	.000	3.33333	3.2860	3.3807
Komunitas pengolah	88.797	29	.000	3.21667	3.1426	3.2908
Pemerintah	139.607	29	.000	3.23333	3.1860	3.2807
Perusahaan	30.650	29	.000	3.10000	2.8931	3.3069

Hasil kajian menunjukkan bahwa komponen yang terlibat dalam komunitas pengelola mangrove dilakukan dengan cara kerjasama dan memiliki hubungan antar komponen secara kelembagaan dalam masyarakat di kawasan pesisir Karangsong. Hubungan antara keempat komponen utama sebagai penggerak menunjukkan signifikan (0.000) untuk semua komponen antara masyarakat pemelihara mangrove, masyarakat pengolah mangrove, pemerintah dan perusahaan.



Gambar: Analisis Jaringan Sumber Komunitas Pengelola Hutan Mangrove

Gambar tersebut menjelaskan analisis jaringan kekuatan, jenis-jenis sumber yang ada dan terlibat dalam komunitas pengelola hutan mangrove yang membentuk kolaborasi berbagai pihak (multipihak) baik individu, kelompok maupun kelembagaan formal dan non formal. Sumber-sumber tersebut dianggap memiliki kepentingan membentuk jaringan hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan antar sumber ini dikarenakan adanya; 1) kesamaan dan kedekatan geografis, 2) kesatuan keberfungsian kelompok, 3) hubungan kekerabatan dan 4) kepatuhan terhadap regulasi.

D. Kesimpulan

1. Intervensi pengembangan masyarakat di pesisir Karangsang dilakukan dengan dua pendekatan yaitu model pengembangan masyarakat lokal dan model perencanaan sosial. Kedua model ini dikembangkan sebagai suatu usaha kesejahteraan sosial untuk tujuan penyelesaian masalah abrasi dan mengembangkan potensi pesisir Karangsang. Pengembangan hutan mangrove sebagai upaya mitigasi bencana abrasi pada tahapan implementasinya lebih dominan menggunakan pendekatan perencanaan sosial. Sedangkan pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil hutan mangrove dalam tahapan intervensinya lebih dominan menggunakan model pengembangan masyarakat lokal.
2. Model pengelolaan pesisir didasarkan pada prinsip keseimbangan yang dapat ditoleransi lingkungan dan masyarakat. Mitigasi bencana di pesisir Karangsang dilakukan dengan cara; (1) struktural; berkaitan dengan teknis menanam, memelihara dan melestarikan hutan mangrove dan pembuatan alat pemecah ombak; (2) non struktural; dengan membuat kelompok pemelihara dan pengolah hasil mangrove dan menetapkan regulasi berupa peraturan desa yang mengatur sanksi bagi warga yang menebang pohon mangrove. Pengelolaan hutan mangrove sebagai mitigasi bencana bergerak ke arah pemberdayaan sosial-ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan mangrove sebagai sumber kehidupan yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; aspek ekologi, edukasi, ekonomi, sosial-budaya dan pariwisata.
3. Potensi sumber pada komunitas pengelola hutan mangrove membentuk jaringan kekuatan. Jenis-jenis sumber yang ada dan terlibat dalam komunitas pengelola

hutan mangrove membentuk kolaborasi berbagai pihak (kerjasama multipihak) baik individu, kelompok maupun kelembagaan formal dan non formal. Sumber-sumber tersebut dianggap memiliki kepentingan yang sama hingga membentuk jaringan hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan antar sumber ini dikarenakan adanya; 1) kesamaan dan kedekatan geografis, 2) kesatuan keberfungsian kelompok, 3) hubungan kekerabatan dan 4) kepatuhan terhadap regulasi.

REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT Rajagrafindo
- Asih Hidayati. 2013. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Daya Dukung Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Batang (Thesis)*. IPB Bogor.
- Fahrudin, Adi, 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama
- Fahrudin, Adi, 2018. *Pekerjaan Sosial sebagai Disiplin Ilmu dan Profesi: Asian Social Work Journal (ASWJ)*, Vol.3 Tahun 2018
- Haryani. 2012. *Disaster Mitigation Model in Coastal Areas through Community Empowering: Jurnal Tataloka*, Vol.14, no.3 tahun 2012, Penerbit Biro Penerbit Planologi Undip
- John Mailhot . 2016. *Green Social Work and Community Gardens: A case study of the North Central Community Gardens (Thesis)*

- Kotler, Philip., Eduardo I., Roberto, 1989, *Social Marketing, Strategies for Changing Public Behavior*, New York: The Free Press.
- Payne, Malcom. 1997. *Modern Social Work Theory. Second Edition*. Londo: Macmillan Press Ltd.
- Rothman, Jack, et.all. (eds) 1995. *Strategies of Community Intervention, Macro Practice*. 5th edition. Illinois: F.E. Peacock Publishers
- Subandono Diposaptono. 2003. Mitigasi Bencana Alam Di Wilayah Pesisir Dalam Kerangka Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Di Indonesia; *Jurnal ALAMI: Jurnal Air, Lahan, Lingkungan, dan Mitigasi Bencana* : Vol.8, No.2 tahun 2003
- Stanis, Stefanus. 2005 *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*. (Thesis) UNDIP
- Wahidin, 2017, *Pola Berpikir dan Sikap Ilmiah Masyarakat Karangsong dalam Memelihara Hutan Mangrove* (Hasil Penelitian)
- Zastrow, Charles (1999), *The practice of Social Work*. *Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company*